

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Agustus 2017 kota Luwuk bergejolak dikarenakan sentimen suku antara warga asli dan warga pendatang memanas. Kota Luwuk merupakan salah kota yang terletak di Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, beribukota di Luwuk. Berdasarkan surat laporan Polisi nomor: LP/420/VIII/2017/Res-Bgi tanggal 22 Agustus 2017 tentang terjadinya tindak penganiayaan yang mengakibatkan Nurcholis Saputra Dayanun (20) meninggal dunia merupakan pemicu memanasnya keadaan kota Luwuk saat itu. Korban penganiayaan tersebut merupakan putra daerah yang berasal dari suku Saluan, sementara tersangka penganiayaan berasal dari suku pendatang yaitu suku Muna.

Kasus yang mulanya merupakan tindakan pidana murni merembet menjadi sentimen suku. Keluarga korban terus melakukan aksi protes dengan cara membakar ban di beberapa ruas jalan. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan keluarga korban terhadap sejumlah pelaku. Penganiayaan ini terjadi pada pukul 01.00 WITA di kompleks Kehutanan, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk. Keluarga Besar Muna menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang menyebabkan kota Luwuk bergejolak. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Herwin Yatim, Wakil Bupati Mustar Labolo, Wakapolres Kopol Doni Prakoso Widamanto, Kasdim 1308 Luwuk Luwuk Banggai, tokoh masyarakat Babasal dan Muna, tokoh agama serta tokoh pemuda di Aula Tribhata Mapolres

Banggai. Surat pernyataan itu berisi apa yang mendasari kejadian yang terjadi pada hari Senin, 21 Agustus 2017 serta pernyataan sikap Keluarga Besar Muna atas kejadian tersebut yang terdiri dari 7 poin.

Namun, sentimen suku semakin memanas sekalipun ikatan keluarga besar suku Muna sudah melakukan musyawarah dan menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat kota Luwuk. Memanasnya keadaan saat itu bukan hanya karena kasus kriminal tersebut namun karena akumulasi kekesalah yang dirasakan warga asli. Puncak dari bentrok permasalahan ini pecah pada tanggal 24 Agustus dimana Suku Saluan yang bermukim di Kintom menggerakkan massa untuk mengepung Kota Luwuk. Mereka bertujuan untuk menyalisir tempat dimana suku Muna mencari nafkah seperti pelabuhan, pasar, dan gudang semen.

Desakan warga dari Mian Saluan Tumpunulipu Kecamatan Kintom ini dikarenakan berbagai kasus kriminal diduga dilakukan etnis atau suku Muna yang ada di kabupaten Banggai. Mulai dari kasus pencurian, pemerkosaan hingga pembunuhan. Desakan ini merupakan puncak kekesalan yang dirasakan warga asli. Aksi massa saat itu sudah menjurus kepada konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor Banggai nomor: R/92/VIII/2017 menetapkan bahwa kondisi keamanan Kabupaten Banggai berada dalam status “SIAGA KONTIJENSI KONFLIK SOSIAL”.

Kemudian pemerintah menggelar acara “Dialog Kebangsaan”. Sebanyak 1200 personil TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan pertemuan antaretnis di

gedung DPRD Banggai pada 28 Agustus 2017. 1200 personil itu berasal dari Brimob Polda Sulteng di Poso, Sabhara Polda Sulteng, Polres Banggai, Kodim 1308 Luwuk Banggai, serta Kompi Senapan C Yonif 714 Sintuwu Maroso. Seluruh personil disebar di kota Luwuk dan Sekitarnya, termasuk wilayah Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara dan wilayah Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan. Semua dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menggelar acara “Dialog Kebangsaan” yang diprakarsai oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Dalam acara tersebut pihak Pemda mengundang semua perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Acara Dialog Kebangsaan melahirkan 11 kesepakatan. Poin ke-sembilan dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan pemulangan keluarga tersangka, hukum yang diterapkan dalam permasalahan ini adalah hukum positif, ketika tetap tidak mendengar selama tiga kali maka berlaku hukum adat yaitu dikembalikan ke kampung halaman.

Hadirnya 11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan hanya untuk meredam masalah untuk sementara, keluhan yang disampaikan warga asli (Suku Babasal) tidak menemukan kejelasan dalam penyelesaiannya. Terkait pemulangan warga Muna merupakan hasil penerapan hukum adat mereka sendiri, namun anggapan di masyarakat bahwa mereka diusir oleh warga Babasal. Persoalan ini merembet menjadi konflik sosial dikarenakan banyak penyebab yang melatar belakangi, salah satunya berbagai keluhan yang diutarakan warga asli atas berbagai persoalan yang

disebabkan oleh warga pendatang (Suku Muna). Mulai dari persoalan ekonomi, kasus kriminal dan pemukiman warga Muna.

Persoalan pada sektor ekonomi ini terkait dengan keluhan bahwa warga Muna menguasai semua sektor sentral perekonomian di Kabupaten Banggai seperti pelabuhan, pasar, dan gudang semen. Persoalan pemukiman warga Muna juga melanggar aturan dikarenakan mereka tinggal di kawasan hutan penyangga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai 2012-2032 juga sudah mengatur terkait hal tersebut namun aturan tersebut tak diindahkan dan tidak ada langkah konkrit dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dampak dari pemukiman yang dibangun pada kemiringan lebih dari yang ditentukan itu menyebabkan kota Luwuk sering mengalami banjir, dan kondisi tersebut semakin parah dari waktu ke waktu.

Pemberitaan mengenai konflik sosial tersebut menjadi pemberitaan yang paling menarik perhatian, karena konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk merupakan hal yang pertama kali terjadi. Konflik sosial tersebut menyita perhatian masyarakat Kabupaten Banggai. Berbagai perkembangan mengenai konflik tersebut banyak dibicarakan di media sosial Facebook dan Instagram. Selain itu media lokal juga mengambil tempat untuk berperan dalam memberikan informasi perkembangan mengenai konflik tersebut.

Penyaluran aspirasi bisa dengan memanfaatkan keberadaan media lokal, media lokal yang menjadi subjek penelitian ini adalah Luwuk Post. Media lokal dalam penelitian ini merujuk pengertian media yang dikelola, terbit, atau beroperasi

di daerah. Artinya kantor pusat di daerah tertentu dan mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai di daerah tertentu karena aspek kedekatan (*proximity*). Dalam konteks surat kabar dapat dilihat dari sisi distribusi, surat kabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, kecuali secara berlangganan. Konsepsi ini sedikit berbeda dengan surat kabar regional dengan skala distribusi nasional sebagaimana fenomena koran Jawa Pos. Media regional semacam ini terbit di daerah (biasanya di ibu kota provinsi) dan disebar ke daerah lain, bahkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan media lokal mencerminkan aspek pemberitaan yang lebih sempit dan lebih bersifat kedaerahan (Yusuf, 2011).

Luwuk Post merupakan media lokal yang berada di kota Luwuk tepatnya di jalan Imam Bonjol No.4 Km 3 Luwuk. Luwuk Post merupakan surat kabar harian pertama dan terbesar yang terbit di Luwuk, Luwuk Post bernaung dibawah panji Grup Jawa Pos Surat kabar ini tersebar di seluruh Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-Una. Selain tersedia dalam versi cetak, surat kabar ini terbit dalam versi online yang bisa diakses pada situs *luwukpostonline.com*, Harga eceran surat kabar ini Rp.5000/eksemplar. Adanya konvergensi media, maka harian Luwuk Post dapat menjangkau dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat dengan mengandalkan Internet. Semakin besar konsumen teks atau pembaca Luwuk Post juga akan memperbesar dan memperluas pengaruh yang diberikan.

Namun, dalam pemberitaan mengenai konflik sosial tersebut Harian Luwuk Post terkadang menjadi menjadi subjektif dan tidak netral. Asumsi tersebut berdasarkan temuan peneliti dengan judul penelitian “Kontruksi Citra Politik dalam

Pemberitaan Konflik Luwuk” penelitian ini menggunakan metode analisis Framing Robert N. Entman. Subyek penelitian ini adalah pemberitaan konflik pada *news.luwukpost.info* yang rilis pada tanggal 23 Agustus – 30 Agustus, khususnya pada berita dengan judul ‘Pendemo Puji Bali Mang’ dan ‘Obama Penyejuk Suasana’ dengan asumsi bahwa pada rentang waktu tersebut pemberitaan konflik sangat intensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *news.luwukpost.info* dalam bingkai berita mengenai peristiwa tersebut mempunyai kecenderungan menaikkan citra politik sosok Samsul Bahri Mang ditengah-tengah gejolak yang berlangsung. Sosok Samsul Bahri Mang menjadi sangat dominan didalam teks pemberitaan. Porsi pemberitaan juga tergolong juga paling sering muncul.

Dalam Kode Etik Jurnalistik telah diatur bahwa pemberitaan haruslah berimbang, tidak memihak, tidak menyudutkan. Namun pada kenyataannya temuan mengenai pemberitaan konflik sosial yang terjadi di Luwuk tidak memberikan kesempatan bagi warga lokal (suku Babasal). Pembiaran-pembiaran atas keluhan yang mereka ajukan berlanjut terus-menerus sampai saat ini. Idealnya media menjadi pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang bermasalah, selain itu juga berperan untuk menampung aspirasi masyarakat. Media yang diharapkan mengambil peran untuk mengawal demokratisasi pada ranah lokal justru kehilangan taringnya. Media menjadi pihak yang membenarkan segala tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Kasus pidana murni yang bermula dari penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis Saputra Dayanun (20) merembet menjadi sentimen suku antara warga

asli (Suku Babasal) dan warga Pendatang. Harian Luwuk Post merupakan media cetak lokal yang memberitakan mengenai peristiwa tersebut. Ironisnya, pemberitaan yang ada tidak memberikan ruang bagi warga asli (Suku Babasal) untuk menyalurkan keluhan mereka atas diskriminasi yang mereka rasakan.

Berangkat dari rumusan permasalahan tersebut kemudian muncul pertanyaan penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana kebijakan redaksional Harian Luwuk Post mengenai pemberitaan konflik sosial?
- b. Bagaimana ideologi dominan atas pemberitaan konflik sosial pada Harian Luwuk Post?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan mengenai kebijakan redaksional dan ideologi dominan atas pemberitaan konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dari segi teoritis diharapkan memberikan tambahan sumbangan pemikiran lebih khusus pada studi kebijakan media lokal terkait dengan pemberitaan konflik sosial yang terjadi disuatu daerah tertentu. Penelitian ini mengenai kebijakan media yang berkaitan dengan pemberitaan konflik sosial yang masih jarang dilakukan. Penelitian ini juga untuk memberikan gambaran kritis terhadap dominasi ideologi dominan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Banggai yang menyebabkan warga lokal (Suku Babasal) yang termarginalkan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada massa, khususnya media cetak lokal. Media memiliki peran sebagai agen perubahan. Media mengusahakan nilai-nilai kesetaraan dan juga berperan sebagai agen yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat tidak melakukan tindakan diskriminasi yang berkaitan dengan persoalan kesukuan yang sensitif. Serta media lokal yang menjalankan salah satu fungsi untuk memberikan informasi mengenai info daerah tanpa memihak dan tanpa merugikan pihak lainnya.

1.5 Kerangka Pemikiran teoritis

1.5.1 State of The Art

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mutaqqin yang berjudul “Ideologi dan Keberpihakan Media Massa” yang merupakan Jurnal Dakwah dan Komunikasi (KOMUNIKA). Penelitian ini bertujuan mengorganisasikan sikap dan tindakan publik pada suatu pilihan yang secara ekonomi dan politik memberikan keuntungan pada pemilik media massa. Isu yang mudah untuk melihat praktik representasi ideologi adalah berita terkait agama. Hal ini tidak lepas dari posisi sentral agama yang dalam beberapa kasus menjadi isu sensitif.

Dalam konteks media massa, ideologi dibentuk bukan dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan tertentu yang berasal tidak hanya dalam arti ide-ide besar, tetapi juga bisa bermakna politik penandaan dan pemaknaan.

Sementara Gramsci mengemukakan bahwa hubungan pemilik modal dan pekerja yang dalam konteks media massa antara wartawan dan pemilik industri media merupakan hubungan yang bersifat hegemonik. Melalui hubungan hegemonik ini, pemilik media melakukan kontrol atas produksi berita yang dijalankan oleh media agar tetap memberikan kepastian bagi ideologi dan kepentingan kapitalnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan Keberpihakan media massa pada ideologi dominan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini karena pada masa industrialisasi, media massa dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Praktik ekonomi industri berlangsung dalam dimensi tunggal yaitu perdagangan atau lebih tepatnya jual beli. Untuk terlibat menjadi pelaku pada praktik ekonomi industri, seseorang, kelompok atau lembaga harus memiliki komoditas yang ditransaksikan. Sementara itu, produk utama media massa adalah berita sehingga dalam konteks ekonomi industri ia harus dikelola sebagai komoditas yang ditransaksikan. Namun jika media massa berpraktik ekonomi layaknya organisasi yang didesain industrial akan dianggap tidak etis dan menyalahi mandat sosial yang diterima.

Pilihan rasional yang dipilih media massa adalah berbisnis dengan cara lain tanpa mengingkari mandat sosial yang diterimanya. Salah satunya adalah berjejaring dan bekerjasama dengan lembaga atau pelaku bisnis ekonomi industri. Bagi pelaku industri, masyarakat atau publik merupakan konsumen yang keberadaannya menjamin bagi keberlangsungan bisnisnya. Sementara bagi media massa, publik merupakan klien utama yang menjadi aset terbesar dan keberadaannya sangat sentral.

Dalam pola hubungan industrial inilah media massa dan pelaku ekonomi industri terbangun. Kebutuhan kapital sebagai instrumen pendukung operasional media massa disediakan oleh pelaku ekonomi industri, sementara kebutuhan pasar bagi industri disediakan oleh media massa. Hubungan yang saling bergantung ini berpengaruh besar bagi performa media massa di hadapan publik. Berita sebagai produk utama didesain bukan hanya berisi informasi tetapi juga seperangkat nilai yang beroperasi secara ideologis untuk mendukung kepentingan tertentu. Kepentingan yang didukung adalah kekuatan yang mendominasi praktik-praktik media massa yang pada umumnya didasarkan atas kontribusi kapital.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dina Oktaviani dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Amerika-Suriah Pada Harian Kompas, penelitian ini merupakan jurnal Ilmu Komunikasi Mulawarman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harian Kompas membingkai berita konflik Amerika-Suriah melalui pendekatan analisis framing model Robert M. Entman. Data diperoleh dari artikel-artikel berita yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah selama satu tahun yaitu edisi 7 Mei 2013 sampai 1 Januari 2014 .

Dari hasil pengamatan peneliti, perbandingan konsep Entman dengan ketiga pakar lainnya adalah meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian dalam membingkai suatu isu terdapat titik singgung utama dalam mengemas suatu berita. Pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media pada proses konstruksi realitas tersebut menghasilkan adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Penyajian tersebut

dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa.

Dari keseluruhan hasil analisis *framing* terhadap berita konflik Amerika-Suriah, peneliti menemukan bahwa artikel berita yang dimuat Kompas, Kompas menjunjung tinggi kaidah jurnalistik salah satunya adalah penulisan berita yang mengandung unsur 5W+1H yang menjadi syarat kelengkapan dalam penulisan artikel berita. Kompas juga banyak menampilkan kutipan dari berbagai sumber sehingga informasi dan data yang ditampilkan berimbang.

Hal ini menguatkan kenyataan bahwa media bukanlah ranah netral dalam berbagai kepentingan dan pemaknaan. Dapat dikatakan bahwa Kompas berusaha mempengaruhi konstruksi realitas sosial di masyarakat untuk memihak pada PBB walau tampak menyudutkan rezim Assad Kompas tetap menyajikan berita sesuai dengan visi misi dan ideologi yang dianutnya yaitu "*humanisme transdental*" humanisme yang imani, yang dalam perwujudannya harus selalu disegarkan dalam menghadapi segala perubahan serba cepat dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara gambaran dan kata-kata yang disajikan Kompas dengan cara berpikir media tersebut mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah yang secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada PBB sebagai organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Azhar Abdullah Qodrat dengan judul "Analisis Wacana Kritis Penyerangan Kompleks Pemukiman Az-Zikra di Media Online Republika". Jurnal ini merupakan jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah wacana diproduksi dalam berita yang dilaporkan oleh media Online Republika pada isu-isu penyerangan komunitas Adzikra yang dipimpin oleh Ustad Arifin Ilham. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis van Leeuwen melalui pendekatan eksklusi-inklusi. Penelitian ini mengambil sample dari tanggal 1 sampai 13 Februari 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media online Republika mengkonstruksikan dua wacana tentang kekerasan dan konflik antara Sunni dan Syiah. Hal ini tampak dari bagaimana Republika menyajikan melalui identifikasi, kategorisasi dan diferensiasi/ Dari cara-cara itu Republika menampilkan kekerasan dan konflik Syiah dan Sunni dengan cara yang tidak lengkap dan tuntas dalam fungsi sebagai pemberi informasi. Hal ini menyebabkan seseorang yang melarang dan melakukan penolakan terhadap Syiah menjadi tidak diketahui dalam konteks instalasi kasus tersebut.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Genta Maghvira dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan TEMPO.CO Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta”. Jurnal ini merupakan Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis wacana kritis dari pemberitaan tentang kematian taruna STIP yang dipublikasikan Tempo.co. Dalam penelitian ini dicermati segala aspek mikrostruktural, mesostruktural dan makrostruktural yang dikembangkan untuk memproduksi teks berita.

Hasil penelitian menunjukkan, Tempo.co melakukan praktik pemilihan diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan narasumber dalam kutipan langsung untuk memproduksi teks berita. Realisasi teks yang dihasilkan

Tempo.co dalam pemberitaan tersebut juga dinilai selaras dengan misinya yaitu menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan. Ada motivasi dalam produksi teks berita tersebut, yakni pembaca digiring untuk memberikan pencitraan positif pada Tempo.co sebagai media yang aktif dan eksis dalam menyuarakan keadilan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hetty Catur Ellyawati dengan Judul “Analisis Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan Istimewa terhadap Terpidana Suap Arthalyta Suryani pada Media Online”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis liputan tentang kasus perlakuan istimewa Arthalyta Suryani yang terungkap, suap terpidana, di tahanan Pondok Bambu yang ditulis oleh dua media online yaitu detikNews.com dan kompas.com

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap media memiliki cara tersendiri untuk menyatakan ideologinya. Ideologi telah menutup hubungan dengan target pasar yaitu pembaca. DetikNews.com menyajikan dengan model berita singkat dan pendek, dengan pilihan kosakata yang tajam, mereka terkait dengan genre berita berita yang dimiliki detikNews.com, tetapi media ini kurang intertekstualitas. Hal membuat berita menjadi dangkal. Di sisi lain, kompas.com memiliki cakupan yang mendalam dan intertekstualitas yang kuat, sangat cocok untuk seseorang yang menginginkan informasi yang komprehensif.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Guba dan Lincoln adalah *“the basic beliefs or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but ontologically and*

epistemologically fundamental way” (Guba & Lincoln, 1994), yang berarti bahwa paradigma adalah keyakinan dasar atau cara pandang terhadap dunia yang memandu peneliti, tidak hanya dalam pemilihan metodologi namun juga berkaitan dengan otology serta epistimologi.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang realitas sosial dengan cara yang berbeda. Realitas bukan diciptakan oleh alam (*nature*), tetapi oleh manusia (*human*). Tradisi kritis dalam komunikasi sangat dipengaruhi oleh perspektif sosial-konflik dalam disiplin sosiologi (Stolley, 2005: 25). Tradisi kritis menganggap ketidakadilan melekat dalam setiap bentuk komunikasi, dan selalu menganggap komunikasi tidak pernah terlepas dari kebohongan, ketidakjujuran dan ketidaklengkapan informasi, Bagi tradisi ini, bentuk komunikasi otentik hanya dapat dicapai melalui kajian refleksif dan menantang emansipasi antarkelas sosial sebagai hal yang harus diwujudkan (Craig, 1999: 147).

Dalam disiplin komunikasi, tradisi kritis menerapkan kajian Karl Marx (terutama berakar dari filsuf Jerman yang aktif di Madzab Frankfrut) mengenai determinisme ekonomi ke dalam dunia industri media massa. Hal ini mengakibatkan munculnya masalah komunikasi, karena setiap produk media baik berupa film, tayangan televisi, dan bentuk media massa lainnya adalah hasil dari ideologi budaya dominan yang cenderung mengopresi, mendiskriminasi dan menekan mereka yang berada dalam budaya minoritas. Tak hanya itu, tradisi ini juga lantang mengkritik bagaimana otoritas, tradisi dan bentuk kepercayaan konvensional dalam suatu masyarakat selalu terdistorsi oleh ideologi kapitalis, rasisme, dan patriakis. Pengetahuan bagi tradisi ini dinilai sarat akan dunia politis

dan tidak pernah tampil objektif karena bergerak dalam kepentingan ideologi dominan (Craig, 1999: 147-148; Griffin, 44).

Tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan paradigma kritis untuk mengkritik dan transformasi hubungan sosial yang timpang. Penelitian kritis berusaha untuk mengubah dunia yang timpang, yang banyak didominasi oleh kekuasaan yang menindas kelompok lain. Ia juga berusaha menghilangkan keyakinan dan gagasan palsu tentang masyarakat, dan mengkritik sistem kekuasaan yang tidak seimbang dan struktur yang mendominasi dan menindas.

1.5.3 Kekuasaan dan Ambiguitas Media Massa

Perkembangan media cetak diawali dengan penemuan mesin cetak dan perkembangannya secara berkala dengan basis komersial dan diperuntukkan untuk kalangan terbuka. Media cetak yang lebih dikenal dengan surat kabar atau koran berisi informasi, rekaman, iklan, isu pengalihan dan juga gosip. Awalnya surat kabar sering disebut sebagai “lawan” oleh pemerintahan yang berkuasa. Para pencetak, penyunting dan wartawan kerap kali mendapatkan kekerasan karena tindakan mereka. Surat kabar menjadi ranah pergulatan demi mendapatkan kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan hak-hak kebebasan dan demokrasi. Penguasa menganggap pers sebagai pihak yang menyulitkan dan menyebarkan walaupun juga pers rentan akan kekuasaan. Namun pers juga tidak selalu bekerja melawan pemerintah terkadang malah bekerja untuk pemerintah.

Media selalu punya hubungan dengan struktur kekuatan politik dan ekonomi yang kuat. Hal tersebut dikarenakan dua hal, *pertama* media memiliki nilai ekonomi yang menyebabkan adanya kompetisi kontrol dan akses dalam tubuh

media itu sendiri. *Kedua*, media merupakan lembaga yang tunduk kepada peraturan politik, ekonomi dan hukum. Ketiga, bagi pihak yang berkuasa media merupakan instrumen yang potensial untuk membawa pengaruh dengan berbagai cara. Keempat, kekuatan media massa tidak dengan rata tersedia untuk semua kepentingan dan kelompok (McQuail, 2011:94).

Sebagian besar organisasi memiliki tujuan yang campur aduk, begitu juga dengan organisasi media massa. Berdasarkan teori organisasional tujuan tersebut dibagi menjadi dua, tujuan organisasional yang fungsional dan tujuan organisasional yang normatif. Organisasi fungsional bertujuan untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan finansial, sementara organisasi normatif bertujuan untuk memajukan sebuah nilai. Posisi organisasi media massa menjadi tumpang tindih antara normatif dan fungsional. Kebanyakan media dijalankan dengan tujuan bisnis namun juga sebagian media dijalankan dengan tujuan-tujuan budaya atau sosial “ideal” tanpa tujuan mencari keuntungan (McQuail, 2011:11).

Sebagaimana yang digambarkan oleh Gerbner dalam Denis McQuail (2011) bahwa setiap komunikator massa selalu bekerja dibawa tekanan dari berbagai “peranan kekuatan” yang datang dari luar. Tekanan tersebut bisa datang dari klien (pengiklan), pesaing (media lain), pihak berwenang (hukum dan politik), para ahli, institusi lain dan khalayak. Setiap peranan kekuatan dan jenis pengaruh tidak ada yang terpisah namun sebaliknya mereka saling tumpang tindih. Akumulasi dari peranan kekuatan dan kemungkinan setiap pengaruh memberikan posisi yang dominan bagi beberapa intitusi dalam komunikasi massa masyarakat mereka.

Meskipun media sudah berhati-hati dalam menyikapi setiap tekanan yang mereka hadapi namun pihak-pihak luar tetap dapat mempengaruhi konten. Paletz dan Entman dalam Denis McQuail (2011) mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang lemah dan pembangkang mendapatkan sedikit perhatian dan pengaruh dari pers. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan memiliki kontrol dan akses yang kecil terhadap peliputan media. Kelompok-kelompok tersebut adalah pelaku kerusuhan, ibu-ibu makmur, mahasiswa militan, kaum reaksioner radikal dan orang miskin. Berdasarkan pemikiran Benner (1990) bahwa jurnalis cenderung mencerminkan atau mengindeks serangkaian suara dan sudut pandang berdasarkan pandangan politik arus utama sehingga menyebabkan suara minoritas dan kritis menjadi terabaikan (McQuail, 2011:286).

Wartawan harus mencegah kemungkinan ataupun kecenderungan terpengaruh oleh subjektivitas pribadi maupun pihak lain. Objektivitas menjadi hal yang sangat penting dikarenakan wartawan harus meninjau setiap masalah dari berbagai sudut pandang agar lebih mencerminkan kebenaran. Berbagai peristiwa kompleks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkadang tidak hanya membutuhkan *cover both sides* namun juga *cover all sides* untuk peristiwa yang tidak hanya melibatkan dua pihak saja. Banyak peristiwa yang tidak bisa disederhanakan menjadi urusan dua pihak saja. Setiap peristiwa memiliki beberapa dimensi dan aspek yang terkait satu dengan yang lain.

Media harus memberikan tempat dan peluang bagi semua pihak secara adil. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dianakemaskan dan dianaktirikan. Namun kenyataannya memang banyak media tidak memberi peluang yang sama kepada

pihak-pihak tertentu dikarenakan wartawan yang menulis atau media tersebut mempunyai *interest* pribadi atau berbeda ideologi. Ada dua kendala utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, kurangnya kesadaran mengenai hal tersebut. Kedua, ketergesaan ataupun desakan waktu yang dialami para jurnalis (Zulkarimein, 2015:133).

1.5.4 Kontrol Sosial oleh Media Massa

Merujuk pada Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial” menunjukkan bahwa intitusi media menyampaikan kondisi yang menyalahi aturan yang ada di masyarakat. Fungsi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hal tersebut. Kontrol sosial yang dilakukan oleh intitusi media bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh pemerintah. Selain itu fungsi untuk mengontrol , mengkritik, mengoreksi segala hal yang terkait dengan pemerintahan harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak memberikan dampak yang merusak tatanan dalam masyarakat dan pemerintah.

Wartawan khususnya di media cetak yang memproduksi teks berita agar masyarakat mengetahui kejadian disekitarnya sehingga hal tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk membuat penilaian dan mengambil sikap (Bill dan Tom, 2001:172). Disamping memberitakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, media juga harus memberitakan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Sehingga atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat juga bisa memberi dukungan dan hal tersebut bisa membuat sinergi

antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Media menjadi sarana komunikasi yang memberitakan dengan berimbang dan aktual. Pers tidak boleh berpihak pada satu pihak saja saat memberikan informasi kepada masyarakat. Semua kelompok masyarakat harus diberikan jaminan akses yang sama.

1.5.5 Muted Group Theory

Muted Group Theory merupakan karya pemikiran dari Antropolog Edwin dan Shirley Aderney. Keduanya merupakan antropolog sosial yang memberikan perhatian pada struktur dan hirarki sosial. Menurut teori ini, perempuan menghadapi dilema yang timbul dari kenyataan bahwa mereka baik dari segi pengalaman dan komunikasi menjadi terbatas dan termarginalisasi. Mereka dianggap tidak relevan dengan wacana publik, tetapi juga efektif sehingga dianggap tidak berharga (Krolokke, 2006:30-32).

Teori kelompok bungkam bukan hasil dari pemikiran sarjana komunikasi namun teori tersebut dapat digunakan dalam riset-riset komunikasi berprespektif kritis. Dalam penelitian kritis berfokus pada ketidaksetaraan. Penelitian dengan menggunakan sudut pandang kritis tidak sebatas hanya mengamati, mengobservasi dan menginterpretasi tetapi juga mengkritisi. Muted Group Theory termasuk dalam teori pada ranah paradigma kritis dikarenakan asumsi teori tersebut adanya pelanggaran kondisi ketidaksetaraan dan penundukan yang bekerja melalui bahasa. Tidak hanya sekedar menjelaskan sebuah fenomena sosial namun memberikan pencerahan bagi kelompok yang termarginalkan (*muted*) untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan pemikiran Shirley dan Edwin Ardener, Cheri Kramarae menyusun tiga asumsi mengenai *Muted Group Theory* dalam konteks komunikasi.

Berikut adalah asumsi-asumsi Muted Group Theory oleh Kramarae :

- a. Wanita memahami dunia secara berbeda dari laki-laki sebab persepsi pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan tersebut berakar pada pembagian kerja (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan.
- b. Laki-laki mendapatkan kuasa secara politik dan selalu mempertahankan dominasi politiknya tersebut dengan mencegah ide-ide dan makna-makna dari perempuan mendapatkan penerimaan publik.
- c. Untuk dapat berpartisipasi di masyarakat, perempuan harus menjerjemahkan ide-ide, makna-makna, dan pengalaman-pengalaman unik mereka ke bahasa atau moda berekspresi laki-laki (Parahita, 2017) .

Kelompok marjinal belum tentu diam (*silent, muted*). Istilah “bisu” menjadi sebuah metafora. Menurut Ardener yang perlu diperhatikan adalah apakah orang dapat menyampaikan apa yang ingin mereka katakan dan dimana mereka ingin menyampaikan sesuatu hal itu. Menurut Ardener, kelompok marjinal tidak akan dihiraukan suaranya oleh kelompok dominan ketika mereka memakai moda berekspresi yang “alternatif”. Kata-kata perempuan atau kelompok subordinat lainnya jatuh ke telinga yang tuli, hal itu terjadi dan berulang kali sekalipun mereka telah mencoba untuk bicara. Kebanyakan teorisasi dan aplikasi Muted Group Theory hanya terfokus pada kelompok yang terbungkam. Sementara para peneliti Mark P.Orbe dan Michael Hecter berasumsi bahwa teori tersebut dapat diaplikasikan pada semua kelompok non dominan. Selain Mark P. Orbe dan

Michael Hecter, Randhika Chopra juga berasumsi bahwa kebungkaman tidak selalu terjadi pada kelompok perempuan, melainkan pada semua kelompok marjinal lainnya (West & Turner, 2010:487).

Asumsi dasar dari teori tersebut adalah ketidakmampuan mengartikulasikan diri dengan baik yang dilakukan oleh kelompok yang termarginalkan. Pembungkaman yang terjadi tidak bergantung pada kekuasaan yang eksplisit namun melalui praktik dan praktik kultural sehari-hari. Pembungkaman yang terjadi membutuhkan kerjasama dan pemahaman bersama mengenai kelompok masyarakat yang berkuasa atas kelompok masyarakat lainnya. Kelompok yang berkuasa itulah yang memiliki dan menciptakan kontrol sistem bahasa yang membungkam kelompok marjinal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

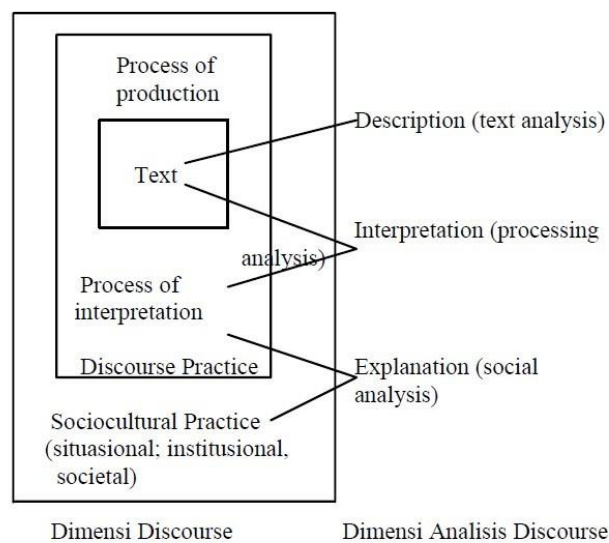
Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang bertujuan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks melalui bahasa. Bahasa disini tidak diteliti secara rigid sebagaimana dalam penggunaan pendekatan bahasa yang lainnya. Yang membedakan analisis wacana kritis secara umum dengan pendekatan bahasa lainnya adalah ia tidak memfokuskan inestigasi utama pada linguistic atau kebahasaan melainkan pada praktik wacana yang disampaikan melalui bahasa (Wodak dan Meyer, 2001:2).

Analisis wacana kritis pada penelitian ini menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough, wacana sebagai praksis berfokus untuk menganalisis

institusi, organisasi, relasi kelompok, struktur, proses sosial politik untuk dipelajari pada tingkat wacana, komunikasi dan interaksi. Fairclough membagi perhatian kepada 3 dimensi.

Skema 1.1

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough



- a. *Text* (teks) : dimensi teks merupakan hal mendasar yang dianalisis, semua yang berhubungan dengan wicara, tulisan, grafik dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks (khasanah kata, gramatika, *syntax*, struktur metafora, retorika). Perbendaharaan kata tertentu dengan makna tertentu. Tata bahasa meliputi kata kerja transitif, tema, dan modalitasnya. Tema terkait dengan fungsi tekstual, sedangkan modalitas berhubungan dengan fungsi hubungan interpersonal. Pada bagian kohesi berfokus pada keterpaduan antar kalimat dan pemakaian kata, sementara dengan struktur teks berfokus mengenai bagaimana logika argument untuk pembenaran disusun dan disistemasi.

- b. *Discourse practice* (praktik diskursif) : semua yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Melihat kekuatan pernyataan dalam arti sejauh mana mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Pada dimensi ini akan dilihat, koherensi teks-teks yang sudah masuk pada wilayah interpretasi, inter teks tekstualitas sudah mendapat perhatian khusus.
- c. *Social practice* (praxis sosial) : semua yang berhubungan dengan konteks diluar teks. Suatu wacana selalu berkelindan dengan berbagai tingkatannya; dalam situasi langsung, dalam institusi dan organisasi yang lebih luas dan pada tingkat masyarakat.

Ketiga dimensi ini mengarahkan dan membentuk tatatan dengan tujuan tertentu yang meliputi dimensi semiotika, konfigurasi *genres* dan *styles* dan strukturasi sosial. *Pertama*, dimensi semiotika merupakan jaringan sosial yang membentuk arena sosial, institusi sosial dan organisasi sosial. *Kedua*, terbentuk konfigurasi khusus dari berbagai *genres*, berbagai *wacana*, dan berbagai *styles* sehingga bisa mengungkapkan makna berbeda dengan tujuan yang beragam pula. *Ketiga*, strukturasi sosial perbedaan semiotika, penataan, khusus hubungan sosial antara beragam cara ‘membuat makna’ beragam *genres*, *wacana*, dan *styles*.

Analisis wacana kritis merupakan kajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan. Beberapa karakteristik dari analisis wacana kritis menjadi pertimbangan dasar peneliti untuk menggunakan pendekatan ini, karena penelitian ini sejak awal

telah menempatkan posisinya dengan fokus pada kelompok yang didiskriminasi secara sosial, yaitu suku Babasal (Banggai, Saluan, Balantak).

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

1.6.3 Sumber Data

1.6.3.1 Data Primer :

Data utama yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam kepada pihak media mengenai bagaimana dinamika konstruksi politik identitas pada media lokal Luwuk Post. Serta melihat bagaimana peran serta kebijakan redaksional Luwuk Post dalam proses tersebut.

1.6.3.2 Data Sekunder :

Data referensi penunjang berupa tulisan/gambar. Data ini merupakan studi literature tentang kajian analisis wacana kritis yang mana data yang diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel di internet maupun media cetak serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibagi dalam tiga katagori, yaitu : Mikro, Meso dan Makro.

Berikut ini adalah rincian subjek penelitian :

Tabel 1.1
Subjek Penelitian

Katagori	Primer	Sekunder
Mikro (Analisis Teks)	Teks berita pada media lokal Luwuk Post.	Teks-teks yang relevan yang mendukung data primer.
Meso (Analisis Produksi)	Jurnalis, Redaktur.	Kebijakan dan Aturan media lokal Luwuk Post.
Makro (Analisis Sosial)	Tokoh Masyarakat, Pihak Pemerintah, Aparatur Negara dan Masyarakat Luwuk.	Studi pustaka serta penelusuran sejarah.

1.6.5 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam kepada subjek penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dihimpun oleh pihak lain yang berguna untuk membantu langkah-langkah penelitian. Data sekunder didapatkan dengan studi pustaka dan literature.

Tabel 1.2

Tehnik Pengumpulan Data

Katagori	Primer	Sekunder
Mikro	Analisis <i>Framing</i> Robert Entman	Analisis Framing Robert <i>Entman</i>
Meso	<i>Indepth interview</i>	Observasi
Makro (Analisis Sosial)	<i>Indepth interview</i>	Studi pustaka serta penelusuran sejarah.

1.6.6 Reduksi Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dari Norman Fairclough. Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks yang lebih besar, dalam hal ini *sociocultural practice*. Pada tahap analisis, ketiga tahapan itu dilakukan secara bersama-sama. Analisis teks bertujuan mengungkap makna dengan menganalisis bahasa secara kritis. *Discourse Practice*, mengantarai teks dengan konteks sosial budaya. Artinya hubungan antar sosiobudaya dengan teks bersifat tidak langsung dan disambungkan *discourse practice*.

Terdapat tiga tahap analisis yang digunakan untuk mengolah data. *Pertama*, Deskripsi yang merupakan tahap menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks, teks hanya dijelaskan tanpa dihubungkan dengan aspek lain. *Kedua*, Interpretasi yakni menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan, pada tahap ini teks tidak dianalisis secara deskriptif tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses produksi teks dibuat.

Ketiga, Eksplanasi yang merupakan tahap untuk mencari penjelasan itu dapat diperoleh dengan mencoba menghubungkan produksi teks itu praktik sosiokultural dimana suatu media berada (Eriyanto, 2011).

Peneliti menggunakan analisis framing Entman untuk mengetahui bingkai berita yang disajikan oleh Harian Luwuk Post terkait pemberitaan konflik sosial. Selanjutnya dilakukan observasi terkait proses produksi dan konsumsi teks atas teks berita tersebut. Hal ini meliputi menggambarkan proses produksi yang dilakukan Harian Luwuk Post serta proses konsumsi atas wacana yang disampaikan oleh Harian Luwuk Post dalam teks berita. Serta menganalisis konteks sosial saat berita tersebut di produksi.

1.6.6.1 Analisis Framing Robert Entman

Analisis pada tahap ini menggunakan analisis framing dari Robert Entman. Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis *framing* ini berfokus pada strategi seleksi, penonjolan dan pertatutan fakta dalam berita agar berita tersebut lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektif media tersebut. Cara pandang media ini yang kemudian menentukan fakta apa yang diambil, dan bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana yang akhirnya membuat berita itu menjadi manipulative dengan tujuan mendominasi.

Entman dalam Alex Sobur (2006) melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Perspektif wartawan yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan

dibuangnya. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah pasti mempunyai peluang besar untuk mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Menurut Entman *framing* memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik dan *frame* dalam teks berita merupakan kekuasaan yang tercetak, ia menunjukkan identitas para aktor atau *interest* yang berkompetisi untuk mendominasi teks.

G.J Aditjondro dalam Alex Sobur (2006) mendefinisikan *framing* sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.

Menurut Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negative apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*); yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*); yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran atau penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya.

1.6.6.2 Wawancara

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan

dengan menggunakan pedoman wawancara, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya :

a. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth intewiwer*), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam mekukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok

pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir

sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

e. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

1.7 Kualitas Data

Guba dan Lincoln menjelaskan bahwa goodness atau kriteria kualitas penelitian dapat diperhatikan dari perspektif yang peneliti gunakan. Untuk paradigma kritis, kriteria yang digunakan kemudian dijabarkan sebagai berikut : 1) pemberian konteks historis (sejauh mana penelitian memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik; 2) pengikisan kebodohan/ ketidaktahuan/ kedunguan dan salah satu pengertian (*erosion of ignorance and misapprehension*); merangsang tindakan (*action stimulus*) (Guba & Lincoln, 1994; Sunarto, 2009).

1.8 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, terbatasnya waktu yang peneliti miliki untuk menyelesaikan penelitian ini. Kedua, kurangnya sumber-sumber informasi melalui literature dari peneliti yang berasal dari Indonesia juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.